

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur jika dilihat dari analisis rasio pendapatan daerah masih sangat rendah yang berarti peran pemerintah pusat masih sangat dominan dan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih tergantung pada pihak luar dan kemampuan pemerintah daerah dalam menggerakkan penerimaan pendapatan PAD belum sesuai dengan yang ditargetkan.
2. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur jika dilihat dari analisis rasio belanja daerah terutama pada rasio efisiensi belanja sudah dikatakan efisien karena pemerintah daerah sudah baik dalam menghemat keuangannya (<100 %). Namun dilihat dari rasio lainnya kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengendalikan belanja daerah masih kurang.
3. Dilihat dari aspek pembiayaan, SiLPA tidak digunakan karena mengalami Surplus. Terkecuali pada tahun 2017 SiLPA digunakan karena mengalami defisit sebesar (Rp 25.505.992.507).

6.2 Saran

1. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kinerjanya, agar menjadi semakin baik dengan cara lebih memaksimalkan serta lebih menggali potensi yang ada pada daerahnya, agar pendapatan asli daerah yang diperoleh lebih banyak sehingga dapat membiayai kegiatan pembangunan di daerahnya maupun kebutuhan belanja daerahnya.
2. Pemerintah Daerah harus memperhatikan proporsi belanja modal agar memiliki dampak dalam pembangunan di daerah
3. Pemerintah Daerah perlu memanfaatkan ataupun mengalihkan SiLPA untuk kepentingan masyarakat yaitu lebih kepada pembangunan fasilitas-fasilitas umum di daerah yang bermanfaat bagi seluruh masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Diah Argariny. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013-2016*. Universitas Sam Ratulangi.
- Fahmi, Irham. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Alfabeta
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Harahap, S. S. 2013. *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hery.2015. *Analisis Laporan Keuangan: Pendekatan Rasio Keuangan*. Yogyakarta : CAPS (Center for Academic Publishing Service)
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> tahun 2022
- Kasmir. 2013. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Kencana: Jakarta.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Dearah*.UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Muliyadi. 2015. *Akuntansi Biaya, Edisi 5*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2015: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sandy Candra Saputra. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana tahun 2010-2014*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat.
- Wening Wilantari. (2017). *Analisis kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Periode 2012-2014*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Widodo,Suparno.2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR.

Zakaria Anshori. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016-2018 (Studi Kasus Pada BPKAD Kab. Lamongan)*. Universitas Islam Lamongan.